
**NOVEL *ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMAD TOHARI*
(Kajian Analisis Wacana Kritis Michel Foucault)**

Achmad Fathoni

SMP Negeri 2 Modo-Lamongan

Telp. 081330719962

E-mail: achmadfathoni99@gmail.com

Abstract: The aim of study was to describe the authority of discursive practice of Orde Baru in novel *Orang – orang Proyek* by Ahmad Tohari, the roles of a literary work as a resistance to the hegemony power of Orde Baru in novel *Orang – orang Proyek* by Ahmad Tohari, the discursive strategy as an effort to frame knowledge or desire in novel *Orang – Orang Proyek* by Ahmad Tohari, the power relation in novel *Orang – Orang Proyek* by Ahmad Tohari. The methodology of this research is descriptive qualitative by using the theory of Michael Foucault's Critical Discourse Analysis. The result of this study shows that the power of Orde Baru wants to form a development by moving the normalization with party similarity that tends to do a dishonest political practice and cause corruption. Novel *Orang –Orang Proyek* by Ahmad Tohari has a role as a tool to fight the authority the discursive of Orde Baru which near with dishonest politic, corruption, and repressive will cause the resistance to the hegemony power. Writing is a discursive strategy that Ahmad Tohari did to apply the *counter-hegemony* to the government through his novel. Power relation will proof that there is a knowledge production to strengthen the authority and the truth.

Keywords: *Michael Foucault's Critical Discourse Analysis, authority discursive practice, discursive role as literary work, discursive strategy, and power relation.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah, 1) mendeskripsikan praktik diskursif penguasa Orde Baru dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari, 2) mendeskripsikan peran diskursif karya sastra sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni penguasa Orde Baru dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari, 3) mendeskripsikan strategi diskursif sebagai upaya untuk menciptakan pengetahuan atau kehendak berkuasa dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari, 4) mendeskripsikan relasi kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Michel Foucault. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan penguasa Orde Baru untuk mewujudkan pembangunan dengan menggulirkan wacana normalisasi melalui penyeragaman partai yang mengarah pada tindakan kecurangan berpolitik dan menimbulkan tindak koruptif. Novel *Orang-Orang Proyek* mengemban peran sebagai wahana untuk menandingi diskursif penguasa Orde Baru. Penguasa Orde Baru yang melakukan kecurangan politik, koruptif, dan cenderung represif sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni penguasa. Menulis merupakan strategi diskursif yang dilakukan Ahmad Tohari guna melakukan *counter-hegemoni* terhadap pemerintah melalui novelnya. Relasi kekuasaan akan memperlihatkan adanya produksi pengetahuan untuk mengukuhkan kekuasaan atau kebenaran.

Kata kunci: *Analisis Wacana Kritis Michel Foucault, praktik diskursif penguasa, peran diskursif karya sastra, strategi diskursif, dan relasi kekuasaan.*

PENDAHULUAN

Ahmad Tohari, salah satu sastrawan yang karya-karyanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat, bahkan beberapa karyanya telah mendunia. Karya-karyanya acapkali diwarnai oleh keberpihakannya pada *wong cilik*. Salah satunya dapat ditemukan dalam novel *Orang-Orang Proyek*. Penyebabnya, Ahmad Tohari marah atau gelisah terhadap para pemimpin yang belum juga membuktikan komitmennya pada orang-orang kecil (Yudiono, 2003:2-3). Hal ini tampak pada Pemimpin atau penguasa Orde Baru yang ingin kekal berkuasadengan wacana-wacana ke publik melalui praktik diskursifnya untuk melanggengkan hegemoni kekuasaannya.

Sebagai bentuk peran diskursif karya sastra, melalui *Orang-Orang Proyek*, Ahmad Tohari menyampaikan gugatan dan kekusarannya terhadap praktik pemerintah Orde Baru yang nyaris mengabadi. Kegusarannya sebagai bentuk resistensi terhadap praktik kekuasaan pemerintah Orde Baru.

Pengarang atau penulis selalu berkaitan dengan aktivitas menulis, sebagai bagian dari proses produksi dan reproduksi teks. Dari menulislah pengetahuan tentang sebuah wacana atau diskursus diciptakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Foucault, pengetahuan itu identik dengan kekuasaan. Kekuasaan muncul berdasarkan pada sejumlah pengetahuan; begitu juga pengetahuan melahirkan kekuasaan. Kekuasaan dan pengetahuan yang dalam buku Foucault ditulis dengan *Power/Konwledge* (2002) adalah ibarat dua sisi mata uang; satu kesatuan yang kemunculannya menuntut kehadiran sisi lainnya. Kehendak untuk

tahu adalah nama lain bagi kehendak untuk berkuasa (Adian, 2002:22).

Karya sastra tidak kalah penting dibandingkan teks-teks faktual, baik tulisan sejarah, berita, maupun karya ilmiah. Namun, karya sastra juga tidak lebih penting dibandingkan teks-teks itu. Masing-masing punya peran dalam menentukan, mengarahkan, mendisiplinkan suatu diskursus. Diskursus (*discourse*) sebagaimana dinyatakan Foucault (2002:9), yaitu cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam penelitian ini akan dibicarakan masalahpraktik diskursif penguasaOrde Baru dalam novel *Orang-Orang Proyek*karya Ahmad Tohari, peran diskursifkarya sastra sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni penguasa Orde Baru dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari, strategi diskursif sebagai upaya untuk menciptakan pengetahuan atau kehendak berkuasa dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari, relasi kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Michel Foucault.

METODE

Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang ditemukan dalam

novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan catat. Analisis data dalam penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif dengan teori analisis wacana kritis Michel Foucault.

PEMBAHASAN

Novel *Orang-Orang Proyek* berlatar waktu pada tahun 1990-1991, bertepatan dengan masa kampanye menjelang pemilu 1992. Sesuai dengan latarnya, hal yang menonjol adalah upaya penyeragaman satu partai dalam wadah Golongan Karya yang oleh Ahmad Tohari diidentikkan dengan Golongan Lestari Menang (GLM) dengan segala pernik-pernik akibat yang ditimbulkan.

a. Praktik Diskursif Penguasa Orde Baru dalam Novel *Orang-Orang Proyek*

Karya Ahmad Tohari

Normalisasi kondisi negara perlu diwujudkan agar pembangunan dapat berjalan. Hanya dengan keadaan politik yang normal dan stabil yang memungkinkan terjadinya pembangunan. Oleh karena itu, perlu tindakan nyata untuk mewujudkan kondisi ideal itu. Salah satu aspek yang harus ditata adalah partai politik. Menurut penguasa Orde Baru partai politik adalah sumber konflik karena keegoisannya. Karena itu, pemerintahan tidak dapat berjalan jika selalu berganti penguasa. Agar tidak terjadi demikian, sumber konflik itu harus dibuat normal. Rakyat hanya punya satu pilihan yang tepat, yaitu Golongan Lestari Menang alias Orde Baru, Orde Pembangunan. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut.

“...Kepada seluruh warga hendaknya dikatakan mereka hanya punya satu

pilihan yang tepat, yaitu Golongan Lestari Menang alias Orde baru. Karena, selain GLM isinya Cuma politikus-politikus tukang omong kosong. Sedangkan kita, GLM, jagonya pembangunan. Maka Ketua Dewan Pembina kita digelari Bapak Pembangunan, iya kan?” (Tohari, 2004:79)

Penguasa Orde Baru berupaya menanamkan pemahaman bahwa Partai-partai selain Golongan Karya hanya berisikan para pembual dan pembohong politik. Yang kerjanya hanya membuat kacau negara. Hal ini seperti dalam kutipan berikut.

“Eh, di masa pembangunan semua dalang harus kreatif menciptakan lakon yang bersemangat Orde Baru. Dan Gatokaca Kembar Tiga menceritakan ada tiga Gatokaca. Yang satu berkampuh warna hijau, satu lagi berkampuh warna merah, dan yang lain berkampuh warna lambang GLM. Dan akhir cerita membuktikan, Sang Gatokaca yang berkampuh warna GLM-lah yang asli. Lainnya palsu dan kerjanya bikin kacau negara.”

“Tapi ceritanya tidak berhenti di situ,” potong Tamu-2. “Setelah dikalahkan oleh Gatokaca asli, maka dua yang palsu berbalik menjadi abdi sang pemenang,” sambung Tamu-2 (Tohari, 2004:80-82).

Di Indonesia pada masa Orde Baru berkuasa terdapat tiga lembaga yang memerankan diri dengan peran seperti itu yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Keberadaan lembaga ini nyaris hanya sebagai simbol dan sebagai stempel demokrasi begitu halnya orang-orang partai yang duduk dalam lembaga legislatif. Tak lebih hanya sebagai eksekusi pula.

“Di tahun 1991 ini Kabul sering membaca kritikan pedas terhadap para anggota dan lembaga DPRD. Secara kelembagaan DPRD sering dicap hanya

menjadi tukang stempel atau aksesori pemerintah Orde Baru. Rakyat jadi pemilih sangat naif yang hanya dipinjam namanya. Keterwakilan mereka di lembaga legislatif sangat rendah. Amanat rakyat pemilih kurang tersalur dan lebih banyak menjadi bahan retorika para politikus” (Tohari, 2004:54)

Golongan Karya pada periode ini memiliki tempat yang lebih istimewa daripada dua partai politik lain. Golongan Karya yang digunakan oleh Suharto sebagai kendaraan politik, dan lembaga stempel paling loyal tempat ia mendaftarkan diri maju sebagai presiden setiap lima tahun sekali. Partai yang kalah dalam pemilu (PPP dan PDI) pada akhirnya akan menjadi partai yang selalu mengamini semua program Orde Baru. Kedua partai ini hanya sekadar simbolisasi pelaksanaan demokrasi, tidak lebih dari itu.

Rakyat yang sudah terhipnotis dengan wacana yang sudah dibangun penguasa hanya bisa tunduk patuh memberikan kesetiaan yang kosong tanpa nilai. Kesetiaan buta karena akal sehat sudah terkalahkan dengan diskursif penguasa.

“Ribuan mesin mulai hidup. Dan sorak-sorai membahana. Sang Ketua Umum datang dan mobil mewahnya menempati kepala barisan. Ribuan massa merengsek dan meneriakan yel-yel GLM ketika diumumkan ketua umum siap menggunting pita tanda presmian penggunaan jembatan. Maka sang ketua turun dari mobil dengan senyum khas karena gigi taringnya sedikit gingsul. Langkahnya megah. Penuh kejayaan. Dan puja-puji, hidup Orde Baru” (Tohari, 2004:215-216).

Orde Baru yang memiliki posisi sebagai *man of desire*, dapat menciptakan dan mengkondisikan kebenaran sesuai yang dikehendaki. Dengan berlatar waktu menjelang pemilu, dalam novel *Orang-Orang Proyek* menjadikan

kampanye sebagai sarana untuk memproduksi wacana tentang mesin politiknya Partai Golongan Lestari Menang yang mampu menghegemoni masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bersikap (beraktualisasi) sesuai dengan wacana penguasa.

a. Peran Diskursif Karya Sastra sebagai Bentuk Resistensi terhadap Hegemoni Penguasa dalam Novel *Orang-Orang Proyek* Karya Ahmad Tohari

Penguasa menutup-nutupi realitas dengan melakukan diskursif. Pengkultusan satu partai yang akhirnya memunculkan tindakan tidak terpuji: kecurangan dan penyelewengan dana proyek demi perayaan hari ulang tahun partai. Ironisnya, para pemimpin di negara demokrasi yang partainya sudah satu azas, dan semua aparatnya sudah ditatar P-4. Ahmad Tohari menggambarkannya dalam kutipan berikut.

“Brengsek! Samad mulai terbakar emosinya. Negara dan pejabat negara merasa dirinya tak bisa salah? Itu kan kultur negara kerajaan yang feodal? Apa kita yang sudah 45 tahun menjadi negara republik masih berjiwa feodal?”

Apa kamu kira negara kita yang konon berpancasila ini, dan semua aparatnya sudah ditatar P-4, sebuah negara republik demokrasi? Bangun, bangun! Hentikan mimpimu. Dan sadari di tahun 1991 ini kita hidup di bawah sebuah orde feodal baru” (Tohari, 2004:111).

Kekuasaan yang lalim dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki otoritas formal dan tradisional, kekuatan represif, maupun kewenangan publik yang luas. Manifestasinya beragam, mulai dari penindasan, pengekangan, pembungkaman, hingga pembiaran atas ketidakadilan. Misalnya, praktik korupsi yang menggila. Korupsi

telah menjadi suatu kewajaran. Kecurangan sudah menjadi barang biasa. Kejujuran adalah hal istimewa bagi orang-orang korup seperti dalam kutipan berikut.

“Ya, kecurangan memang sudah menjadi barang biasa. Maka Dalkijo juga pernah bilang kepada Kabul, si jujur adalah orang yang menentang arus dan konyol. Blo'on. Mungkin. Namun bagi Kabul kejujuran sebenarnya bukan suatu hal yang istimewa. Dialah yang seharusnya dianggap biasa “(Tohari, 2004:52).

Salah satu bentuk respon terhadap tatanan yang lalim adalah munculnya resistensi publik. Ini merupakan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan, penentangan terhadap penguasa yang lalim, maupun gerakan tandingan yang dilakukan oleh rakyat atas kebijakan rezim. Secara konseptual, gerakan rakyat ini bisa berupa *counter-movements*, *counter-hegemony*, maupun infrapolitik.

“Pertanyaan apa? Kalau sulit saya tak bisa.

Mudah saja. Mengapa beberapa penduduk di sini suka menyuap kuli-kuli untuk mendapat, atau tepatnya dicurikan semen?

Oh, maaf. Tadi Mas Kabul tanya apa? Ah, saya ingat. Ada orang kampung ingin mendapat semen dari proyek ini dengan cara menyuap kuli-kuli?

Ya.

Tanpa maksud membela sesama saudara sekampung, bukankah mereka tak bisa merugikan proyek tanpa kerja sama dengan orang dalam, bukan?”

Ya. Tapi kan, selama ini saya menganggap orang kampung lugu, bersih, tidak *melik* terhadap barang orang lain.

He he he..., itu dulu, Mas Kabul. Sekarang lain. Sekarang orang kampung menganggap, misalnya, mengambil aspal dari pinggir jalan adalah perkara

biasa. Bila ketahuan, ya mereka akan membeli rokok buat pak mandor. Selesai.”

(Tohari, 2004:15-16)

Kutipan di atas dapat menunjukkan bahwa rakyat kecil menjadi bersifat apatis dengan tindak korup atau penyelewengan yang sudah terjadi di mana-mana. Pelakunya tidak tanggung-tanggung dari para kontraktor, pejabat, hingga para wakil rakyat. Jadi rakyat pun melakukan semacam gerakan tandingan untuk ikut merasakan uang korupsi. Yang menarik adalah bahwa hukum pun bisa dipertanyakan. Sanksi bisa hilang dengan adanya permainan. Penegakan hukum yang amburadul. Dalam pola pikir masyarakat yang sudah koruptif memainkan undang-undang demi kepentingannya sudah biasa. Kutipan berikut menunjukkannya.

“Pak Dalkijo, saya ingatkan ada undang-undang nomor 18 tahun 1990; pemborong wajib menjamin bangunan yang dikerjakan bisa bermanfaat setidaknya selama sepuluh tahun.

Wah, Dik Kabul, terima kasih atas peringatan ini. Dan terus terang, saya juga tidak pernah melupakan undang-undang itu. Tapi bisa dibilang undang-undang tersebut baru lahir kemarin sore. Jadi, belum memasyarakat. Lagi pula Dik Kabul tahu bagaimana efektivitas hukum di negeri ini. Penegakkannya amburadul. Makanya banyak orang bilang di sini hukum dibuat hanya untuk di langgar, iya kan?” (Tohari, 2004:186)

Aksi infrapolitik merupakan bentuk resistensi publik yang sangat mudah dijumpai. Manifestasi infrapolitik oleh rakyat kecil sangat beragam, mulai dari gaya subversi halus, pembangkangan, hingga pemberontakan. Dalam novel *Orang-Orang Proyek* direpresentasikan oleh Kabul yang dengan tegas tetap tidak mau bekerja sama untuk menyelewengkan dana proyek demi

hanya untuk kegiatan HUT Partai Golongan Lestari Menang. Walaupun ia harus dianggap orang yang tidak loyal pada Orde Baru, tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Menurutnya penyelewengan adalah kesalahan besar. Korupsi dengan mengambil dana proyek untuk kegiatan lain tidak boleh disamakan dengan bentuk partisipasi pembangunan. Penyelewengan adalah penyelewengan. Kabul tetap bergeming, sekalipun ia harus berhadapan dengan tuduhan subversif dan tidak bersih lingkungan, bahkan harus berhadapan dengan tindakan represif aparat.

“Tapi Kabul, benarkah kamu akan seberani itu? Sebab bila kamu berani membantah, si Tamu-1 pasti akan menerormu dengan tuduhan sengit; loyalitas terhadap Orde Baru diragukan; tak mau berpartisipasi dalam pembangunan. Atau kamu akan diteliti, dikuliti, sampai mereka yakin bahwa kamu bersih lingkungan. Yakni kamu bukan anak, kemenakan, sepupu jauh, satu buyut, dengan orang-orang yang terlibat gerakan komunis” (Tohari, 2004: 85).

Kutipan lain juga disebutkan,

“... Dengar, Dik. Untuk memeriksa atau bahkan menahan Dik Kabul, mereka akan menemukan banyak alasan. Misalnya, menghambat pelaksanaan program pembangunan; tidak loyal kepada pemerintah; menentang Orde Baru, sampai indikasi bahaya laten komunis. Dan sekali Dik Kabul berurusan dengan aparat keamanan, nama Dik Kabul akan masuk daftar hitam; Dik Kabul akan tetap diawasi dan mungkin tidak akan dapat bekerja di mana pun” (Tohari, 2004:205).

Dalam kesehariannya, resistensi publik bisa terekspresikan melalui karnaval budaya, ritual lokal, hingga bentuk kesenian rakyat lainnya yang sarat kritik dan pesan untuk penguasa lalim serta ajakan untuk rakyat supaya tidak

larut dan permisif terhadap kekuasaan yang lalim. Semua itu mengarah pada upaya sadar, meski tanpa koordinasi, oleh rakyat yang tertindas dan tergilas ketidakadilan untuk menegasikan *public transcripts*, yaitu potret diri penguasa dan wacana kekuasaan yang diproduksi dan diinternalisasi oleh para elite penguasa lalim melalui berbagai instrumen dan media sosialisasi supaya ketidakadilan dan kelaliman diterima sebagai hal wajar oleh rakyat kecil.

Dalam novel ini, Ahmad Tohari tidak memberikan revolusi itu sebagai pilihan untuk keluar dari permasalahan yang dibicarakannya. Tetapi, ia menawarkan solusi damai. Lebih pada pelontaran wacana untuk merenovasi karakter bangsa dengan kereligiusitasannya dan kejawaannya. Ahmad Tohari menawarkan solusi untuk keluar dari korupsi dengan *selalu ingat Tuhan, jujur, dan sederhana*.

Selalu ingat pada Tuhan (*eling*) adalah yang paling dasar dalam keimanan. Allah swt telah mengutus Nabi Muhammad untuk menata keimanan yang sebenar-benarnya sehingga umatnya berbudi pekerti luhur. Dengan begitusegala masalah negeri ini teratasi.

“Ya. Bahwa Kanjeng Nabi tidak diutus, k-e-c-u-a-l-i untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ah, dari dulu kita terpesona oleh kata ‘kecuali’ itu yang agaknya diabaikan oleh banyak orang. Padahal kosakata itu, dalam konteks riwayat tadi, punya peran amat strategis” (Tohari, 2004: 36)

Kemudian dilanjutkan dalam kutipan,

“...’Kecuali’. Kosakata ini sepanjang permenungan Pak Tarya, mewajibkan orang membidik serta memaknai seoptimal mungkin kata kunci berikutnya, yakni ‘menyempurnakan akhlak’. Karena selain ‘menyempurnakan akhlak sudah dikecualikan. Artinya, selain penyempurnaan akhlak, bukan tujuan

diutusnya Kanjeng Nabi” (Tohari, 2004:38)

Jujur (*temen*) merupakan salah satu wujud budi luhur yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur identik dengan kebenaran. Jadi memanfaatkan kesempatan atau mengklaim hak orang lain berada jauh dari wilayah kebenaran ini. Selain mendatangkan ketenangan, kejujuran juga akan mendatangkan kemudahan. Dalam *Orang-Orang Proyek*, kejujuran Kabul jelas berdampak pada kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Kejujurannya merupakan bagian didikan ibunya, yaitu *cablaka*.

“Kegelisahan saya mungkin muncul karena saya mewarisi watak orangtua. Saya anak petani kecil. Kami biasa bersikap *cublaka*. Tidak biasa nakal. Tidak biasa *selingkuh*, apalagi selingkuh.” (Tohari, 2004:67)

Sederhana (*Prasaja*) merupakan hidup hemat, tidak konsumtif. Dalam *Orang-Orang Proyek* dititipkan oleh Ahmad Tohari pada tokoh *biyung*, ibu Kabul. Dengan kesederhanaan, ia mendidik anak-anaknya menjadi manusia sejati. *Biyung* menjadi petunjuk bagaimana seorang berlaku hemat di masa materi berlebih, tidak cepat silau dengan kemewahan. Walaupun Kabul sudah bekerja, namun *Biyung* tetap berkarya. Ia tidak mau hanya menggantungkan pemberian sang anak. Kesederhanaan ini pantas untuk dicontoh bagi para penguasa agar rakyat juga memiliki pola hidup yang sama dengan penguasanya.

b. Strategi Diskursif sebagai Upaya untuk Menciptakan Pengetahuan atau Kehendak untuk Berkuasa dalam Novel *Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari*

Tulisan, sebagai salah satu produk teks merupakan faktor penting dalam

membentuk diskursus. Derrida pernah menyatakan bahwa tidak ada apa-apa di luar teks, *Il n’y a pas de hors-texte*. Semuanya ada dalam teks belaka. Melalui tekslah pertarungan membentuk hegemoni atau kekuasaan itu berlangsung (Kurniawan, 2005).

Dengan menulis novel *Orang-Orang Proyek*, Ahmad Tohari menyampaikan kekusarannya atas tindak penguasa Orde Baru. Ia merasa geram dengan ketidaksesuaian antara kebenaran wacana yang dimunculkan penguasa Orde Baru dengan realitas. Wacana penyeragaman partai dengan dalih mewujudkan stabilitas atau normalisasi dan demi pembangunan ternyata hanyalah stabilitas semu. Begitu pula dengan pembangunan. Pembangunan memunculkan adanya praktik korupsi. Penyebabnya adalah keinginan para pengurus partai untuk mendanai berbagai kegiatan partai yang berkuasa melalui proyek-proyek yang dianggap sebagai milik orang-orang partai. Hal ini seperti tampak dalam kutipan berikut.

“Dan campur tangan itu ternyata tidak terbatas pada penentuan awal pekerjaan yang menyalahi rekomendasi para perancang, tapi masuk juga hal-hal lain. Proyek ini yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dan akan menjadi beban masyarakat, mereka anggap sebagai milik pribadi. Kabul tahu bagaimana bendahara proyek wajib mengeluarkan dana untuk kegiatan partai golongan penguasa” (Tohari, 2004 : 22).

Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan itu pula, Ahmad Tohari melalui tulisannya (novelnya) ingin menanamkan pengetahuan dalam benak pembaca bahwa sebenarnya dalam pembangunan ada konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh rakyat; utang luar negeri. Dana pembangunan itu berasal dari utang luar negeri yang akan menjadi

beban masyarakat. Eronisnya masyarakat telah terbutakan oleh wacana pemerintah Orde Baru. Dan utang itu ternyata tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga dimanfaatkan oleh penguasa melalui partainya untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Kekuasaan yang menurut Ahmad Tohari sebagai kekuasaan yang gila.

“Saya jujur. Bukan hanya desa ini, melainkan semua desa membutuhkan kades atau lurah seperti kamu. Saya kira perubahan harus dimulai dari desa. Sayang, saya juga tahu hal ini tidak mudah dalam sistem kekuasaan gila seperti ini” (Tohari, 2004:93)

Pada kutipan lain disebutkan pula, “Terima kasih. Kalau kamu bilang saya dibutuhkan, saya akan mencoba bertahan. Saya akan bersiasat untuk sedikit mengurangi dampak kerakusan GLM agar kerusakan desa saya tak terlalu parah. Ya kalau benda yang rusak, tapi kalau hati dan moral rakyat serta nilai-nilai yang hidup disini?” (Tohari, 2004:94)

Penghilangan hak sebagai warga negara yang merdeka sering diterima oleh rakyat. Rezim yang represif, selalu memberikan label dengan “perbuatan makar, subversif, tidak bersih lingkungan, eks tapol-napol, dan masih banyak lagi yang lainnya pada orang-orang yang menentang penguasa. Dengan kenyataan ini Ahmad Tohari menyadarkan pembaca bagaimana nistanya nilai kemanusiaan orang-orang yang ber-KTP OT dan ET sebagaimana kutipan berikut.

“Gusti, demi memiliki nama Sang Pengampun, Sang Penyayang. Haruskah mereka menanggung beban sejarah seumur hidup? Haruskah anak cucu mereka terus menanggung hukuman kesalahan politik yang tidak mereka lakukan? Lihat mata mereka ketika kusebutkan kata ‘GLM’ atau ‘Orde Baru’ atau ‘pemerintah’ atau lainnya

yang menyangkut kekuasaan negara. Dalam bola mata mereka ada cekam ketakutan. Ada bayangan menggigil karena kecut hati. Wajah berubah jadi pucat dengan bibir bergetar. Tangan *wel-welan* karena tak tahu lagi cerca dan nista, apalagi yang akan mereka terima” (Tohari, 2004:86)

Dalam kutipan lain disebutkan pula,

“...Mereka adalah warga desa yang disandangi gelar yang selalu membuat mereka ketakutan: OT dan ET. Dan saya – Kades Basar- mendapat perintah mengabadikan stigma pembontakan komunis tahun 1965 hingga harga diri dan jiwa mereka luluh?...” (Tohari, 2004: 86)

Rehabilitasi para korban Orde Baru akan didengar oleh kalangan pimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif, kalau ada desakan yang kuat dan terus-menerus oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Rehabilitasi nama baik para ex-tapol ini bukan saja akan membebaskan para ex-tapol dari penyiksaan batin (dan juga fisik, bagi sebagiannya), tetapi juga melegakan para keluarga dan sanak-saudaranya (dekat maupun jauh) yang jumlahnya cukup besar. Rehabilitasi nama baik para ex-tapol juga akan menimbulkan dampak kesejukan dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan langkah penting untuk terciptanya rekonsiliasi nasional.

Ahmad Tohari sebagai pengarang yang tidak lainpula adalah salah satu agen hegemoni sebagaimana dinyatakan oleh Gramsci, yakni sebagai intelektual; sebagai intelektual tradisional yang menjadi bagian dari kelompok subordinat yang melakukan resistensi atas kelompok hegemonik. Melalui karyanya ia menghadirkan wacana rehabilitasi bagi orang-orang yang ‘dianggap’ pemerintah Orde Baru sebagai komunis. Ia ingin menghilangkan stigma yang disandang para warga dengan KTP dengan OT dan

ET. Boleh dikata Ahmad Tohari seperti halnya Said, Oktar, Gray, dan Brown yang telah melakukan *counter-hegemonik* atas diskursus orientalisme, holocaust, terorisme, dan keimanan Kristiani.

c. Relasi Kekuasaan dalam Novel *Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari*

Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan- Pengetahuan (Eriyanto, 2003:65).

Dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh cerita merasakan adanya entitas penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan Orde Baru dalam sepak terjang pemerintahannya sehingga melahirkan pengetahuan. Begitu pula sebaliknya. Penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Terkait bahaya komunisme, misalnya.

Komunisme merupakan suatu wacana paling penting dalam kekuasaan orde baru. Lewat sekolah-sekolah dan institusi pendidikan disebarkan pengajaran sejarah yang menggambarkan kekuatan komunis itu buruk sekali. Lewat birokrasi dengan membedakan perlakuan yang berbeda kepada yang dituduh punya kaitan atau orang tuanya komunis. Lewat institusi militer, dilakukan dengan melarang orang yang punya indikasi komunis masuk militer. Lewat pemerintah, dengan penerapan litsus. Dan lewat institusi kemasyarakatan dengan pemberian kode tertentu kepada mereka

yang diindikasikan punya hubungan dengan komunis dan punya potensi mempunyai ideologi komunis. Dengan penyebaran serentak semacam itu khalayak didikte untuk memandang komunisme sebagai sesuatu yang berbahaya sekaligus sebagai kekuatan yang harus diwaspadai karena setiap saat bisa bangkit.

Pengetahuan ini ditanamkan ke benak khalayak dikontrol, diatur, didisiplinkan bukan dengan jalan fisik, tetapi lebih kepemikiran, ide sehingga selalu waspada dengan kekuatan komunis. Pelabelan dalam identitas diri penduduk dipakai sebagai strategi agar rakyat menginternalisasi pengetahuan yang diwacanakan Orde Baru.

“Jangan lupa warga yang ber-KTP dengan tanda OT atau ET. Ingatkan mereka akan peristiwa ’65 agar mereka dan seluruh keluarga mereka menjadi pendukung kita. Manfaatkan kekuasaan Anda ketika warga datang untuk minta tanda tangan demi melestarikan kemenangan GLM. Dan, Anda tidak akan memberikan atau memperpanjang surat izin usaha untuk toko, warung, kilang padi, dan sebagainya, kecuali mereka berjanji dan sudah terbukti mendukung kita” (Tohari, 2004:80)

Pencantuman OT dan ET dalam KTP penduduk yang dianggap memiliki kedekatan dengan “komunisme”. Basar sebagai kepala desa dengan pengetahuan tersebut demi kelestarian kemenangan GLM. Begitu pula untuk warga lainnya yang ingin memperpanjang surat izin usahanya harus membuat dan mengisi lembar-lembar tertulis yang berisi pernyataan dukungannya kepada GLM. Di era kejayaan Orde Baru bukan hal aneh bila harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari pimpinan ranting Golkar jika akan mengurus suatu urusan. Basar memiliki kapasitas untuk

menyampaikan pengetahuan sebagai orang yang dianggap memiliki kuasa.

Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat. Inilah yang diharapkan dalam konteks ini. Adanya regulasi-regulasi dari dalam yang menormalkan. Kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Sebagai contoh dapat disebutkan seorang karyawan yang secara berdisiplin bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Bahwa ketaatan karyawan tersebut bukan karena adanya represi dari bos atau pimpinan namun karena adanya regulasi-regulasi dari dalam yang menormalkan. Mereka bekerja dengan giat bukan saja hanya karena ada ancaman atau tekanan tapi juga karena adanya semacam struktur diskursif yang mengatakan akan ada penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja.

Tokoh Basar, mantan aktivis, yang dulunya giat berdemo menentang Orde Baru kini harus menjadi bagian dari Orde Baru. Sebagai kepala desa ia secara otomatis menjadi orang Golongan Lestari Menang (Golkar). Realitas ini mengharuskannya untuk melakukan disiplin tubuh bahwa ia adalah Golongan Lestari Menang. Internalisasi terjadi dalam diri Basar. Kekuasaan telah memproduksi pengetahuan baru pada diri Basar sebagai kepala desa dan sebagai orang partai. Basar menjelma menjadi tubuh-tubuh yang taat (*dociel bodies*) sebagaimana dalam kutipan berikut.

“Memang ya. Karena, sistem kekuasaan di bawah Golongan Lestari Menang, GLM, menempatkan jajaran perangkat desa dan kelurahan seluruh Indonesia menjadi *onderbouw* mereka. Jajaran perangkat desa adalah satu di antara tiga pilar penopang GLM. Dua pilar lain adalah birokrasi pegawai negeri dan ABRI. Maka suka atau tidak, seorang

kades seperti Basar sudah tercantum sebagai kader Golongan Lestari Menang” (Tohari, 2004:83).

Kekuasaan sesuai data di atas sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif. Namun, kekuasaan di atas dilakukan dengan menciptakan regulasi-regulasi dalam struktur kehidupan masyarakat tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan yang lebih ekonomis. Sistem panoptis diterapkan penguasa untuk menciptakan kepatuhan warganya, khususnya para pejabat pemerintah. Dalam tubuh-tubuh itu terdapat internalisasi atas perturan-peraturan yang diciptakan penguasa.

Di sisi lain, internalisasi pada tokoh Kabul misalnya. Dalam dirinya telah tertanam kuat atas pemahaman kejujuran dan berkorupsi dengan melakukan tindak penyelewengan berarti tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Tindak penyelewengan merupakan suatu bentuk penghianatan atas tujuan mulia pembangunan. Kepatuhan seperti inilah yang mestinya perlu dibangun dalam upaya membebaskan negara republik ini agar terbebas dari masalah dekadensi moral, korupsi akibat hilangnya ketidakjujuran.

“Aku insinyur. Aku tak bisa menguraikan dengan baik hubungan antara kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan proyek ini dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin... Yang jelas bagiku kecurangan besar maupun kecil yang terjadi di proyek ini pasti akan mengurangi tingkat kesungguhan, bahkan mengkhianati tujuan dasarnya. Dan hatiku tak bisa menerimanya” (Tohari, 2004: 31-32).

Keberadaan panoptisme dan internalisasi dalam diri tokoh di atas memperlihatkan cara membaca yang

berbeda tentang kekuasaan sebagaimana Foucault memahami kekuasaan yang sangat orisinal. Kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Kekuasaan lebih pada individu, subjek dalam lingkup yang paling kecil. Dikatakan individu karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagipula sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan kajian analisis wacana kritis Michel Foucault ini dapat diketahui bahwa dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari ini menunjukkan adanya praktik diskursif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang kuat adalah *normalisasi* dengan penataan partai politik, karena partai politik adalah sumber konflik. Agar tidak terjadi demikian, sumber konflik itu dibuat normal, ditata sehingga partai politik tidak menjadi penghalang kelangsungan pembangunan. Partai politik harus diseragamkan atau harus ada satu partai yang lebih dominan. Golongan Karya yang dalam novel Ahmad Tohari disebut Golongan Lestari Menang, sebagai kendaraan politik dan salah satu pilar Orde Baru harus mendominasi perolehan suara dalam setiap pemilu. Struktur diskursif inilah yang dibangun oleh Orde Baru dan disebarkan lewat pernyataan pidato dari pejabat pusat sampai daerah, lewat buku-buku ajar sekolah, dan sebagainya.

Dari kajian ini dapat disimpulkan pula bahwa karya sastra (Novel *Orang-Orang Proyek*) memiliki peran diskursif. Novel ini sebagai wahana untuk menyampaikan wacana. Bentuk diskursifnya merupakan *counter-hegemonik/resistensi* terhadap penguasa Orde Baru. Resistensi dalam novel *Orang-Orang Proyek* bukan konter-hegemoni yang represif dan anarkis. Novel *Orang-Orang Proyek* telah menunjukkan bahwa praktik-praktik diskursif penguasa Orde Baru; normalisasi/stabilisasi dengan penyeragaman partai demi kelangsungan pembangunan ditandingi dengan wacana di balik berbagai proyek pembangunan ada penyelewengan, korupsi. Korupsi yang muncul akibat keinginan menjaga superioritas partai.

Selain diwujudkan dalam bentuk wacana yang merupakan konter-diskursif penguasa Orde Baru, resistensi ini ternyata berupa wacana yang memuat ide-ide solutif Ahmad Tohari dalam mengentaskan problem korupsi bangsa melalui perbuatan para tokoh novel.

Menulis merupakan salah satu strategidiskursif dalam menciptakan pengetahuan; dengan kata lain yaitu kehendak untuk berkuasa. Pengetahuan, sebagaimana dinyatakan oleh Foucault, identik dengan kekuasaan. Menulis, termasuk menulis karya sastra, merupakan salah satu dari strategi itu. Melalui novel yang telah ditulisnya, Ahmad Tohari menggulirkan wacana sebagai bentuk *counter-hegemonik* pemerintah Orde Baru; penyeragaman partai ternyata hanya menimbulkan masalah baru yakni korupsi. Di samping itu, rehabilitasi terhadap warga yang ber-KTP dengan tanda OT dan ET juga diwacanakan oleh Ahmad Tohari.

Disimpulkan pula bahwa relasi kekuasaan tampak dalam pengetahuan (wacana) yang diproduksi oleh

pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan kekuasaan/melakukan pembenaran guna melanggengkan hegemonninya. Apa yang sudah tertanam sebagai kebenaran dalam aras pikiran rakyat perlu dilanggengkan. Untuk melanggengkannya, pemerintah Orde Baru menerapkan panoptisme. Yakni, pengawasan yang diskontinyu, namun membawa dampak yang kontinyu. Praktiknya dibentuklah regulasi-regulasi dalam struktur sosial masyarakat agar masyarakat menjadi tubuh-tubuh yang patuh, manusia yang disiplin. Kedisiplinan ini bukan karena sikap represif ataupun oprasif, namun semata-mata karena adanya internalisasi terhadap pengetahuan yang ia pahami. Sistem panoptis ini ada kalanya bersifat halus dan kadang kasar bila terlampau kasar, bisa berdampak buruk pada kekuasaan.

Peneliti berharap bahwa *Pertama*, kebohongan dan kezaliman walau ditutup-tutupi akan terlihat juga. Wacana seyogyanya digunakan untuk menciptakan *grand narrative* yang memungkinkan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Antara wacana yang dibangun dan kenyataan harus diselaraskan agar tidak terjadi resistensi terhadap wacana yang digulirkan.

Kedua, keberadaan partai, sedikit atau banyak jumlahnya belum tentu akan menjamin berlangsungnya demokrasi yang baik. Semuanya bergantung pada pelakunya. Oleh karena itu, kedewasaan berpolitik dan etika berpolitik perlu dibangun. Penyeragaman partai yang keterlaluan nyatanya dapat menumbuhkan bibit penyelewengan wewenang dan kekuasaan. Penggiat partai akan berupaya untuk mewujudkan cita-cita partai dan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Korupsi, intimidasi, dan kecurangan-kecurangan politik bisa jadi

akan tumbuh subur di negeri ini. Kebijakan penggalangan dana kegiatan partai dengan dalih partisipasi untuk pembangunan seperti pada novel *Orang-Orang Proyek* sebagai bukti akan hal itu. Oleh karena itu, harus ada batas yang tegas dalam pendanaan partai. Jika kesadaran berdemokrasi masyarakat maka jumlah partai yang porposional dan profesional akan menambah kualitas demokrasi di Indonesia.

Ketiga, karya sastra pun memiliki andil dalam pemberian pencerahan. Penggalan nilai untuk perbaikan negeri ini dapat ditemukan dalam karya sastra. Solusi dalam upaya mengatasi korupsi misalnya. Oleh karena itu, karya sastra harus tetap mendapatkan tempat dan tidak boleh dipinggirkan dalam pengkajiannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adian, Donny Gahral. 2002. “Berfilsafat Tanpa Sabuk Pengaman, Sebuah Pengantar,” dalam *Pengetahuan dan Metode, Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Allen, Pamela. 2004. *Membaca, dan Membaca Lagi, [Re]interpretasi Fiksi Indonesia 1980-1995*. Magelang: Indonesiatara.
- Budianta, Melani. 2002. “Teori Sastra Sesudah Strukturalisme: dari Studi Teks ke Studi Wacana Budaya,” *Bahan Pelatihan Teori dan Kritik Sastra*. Jakarta: PPKB Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Damono, Sapardi Djoko. 1989. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: P3B Depdikbud.

- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosiologi sastra*. Yogyakarta: CAPS.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis teks Media*. Yogyakarta: LKiS
- Esten, Mursal. 1984. *Sastra Indonesia dan Subkultur*. Bandung: Angkasa.
- Faruk. 2010. *Pengantar Sosiologi Sastra: dari structural Genetik sampai Post-Modernism*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 2002a. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang.
- Foucault, Michel. 2007. *Order of Thing : Arkeologi Ilmu-Ilmu Pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Tim Kita. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 2011. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Michel Foucault*. Diterjemahkan oleh Arif. Yogyakarta: Jalasutra.
- Foucault, Michel. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Munzir. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hardiyanta, P. Sunu. 1997. *Michel Foucault : Bengkel Individu Modern Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryatmoko, "Kekuasan melahirkan Anti Kekuasaan" dalam Jurnal Basis No 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari 2002.
- Jalal, Moch. Tanpa Tahun. *Praktik Diskursif The Theory of Truth Michel Foucault dalam Kontruksi Simbolisaasi Bahasa di Indonesia*. (Online), (<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Praktik%20Diskursif.pdf>, diakses pada 9 September 2013).
- Kurniawan. 2005. "Bekas-bekas Dekonstruksi Derrida" (www.Cybersastra.net, diakses pada 9 September 2013).
- Luxemburg, Jan van et al. 1984. *Pengantar Ilmu Sastra: Terjemahan Dick Hartoko*. Jakarta: Gramedia.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1998. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhadi. 2006. *Peran Diskursif Karya Sastra*. *Jurnal Diksi FBS, UNY*. (Online), No. 44 Edisi Januari. (<http://staff.uny.ac.id...>, diakses 9 September 2013).
- Nurhadi. 2006. *Menulis sebagai Strategi Diskursif*. *Jurnal Diksi FBS, UNY*. (Online), No. 32 Edisi 2005. (<http://staff.uny.ac.id...>, diakses 9 September 2013).
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1997. *Prinsip-Prinsip Kritik Sastra*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwanto, Bambang. 2003. "Historisisme Baru dan Penulisan Sejarah," dalam Muh. Arif Rokhman dkk.,

-
- Sastra Interdisipliner*. Yogyakarta: Qalam.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2009. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohari, Ahmad. 2004. *Orang-Orang Proyek*. Yogyakarta: Mahatari.
- Tim Penyusun KBBI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan, Membongkar Mitos hegemoni Barat* (terjemahan dari *Culture and Imperialism, 1993*). Bandung: Mizan.
- Said, Edward W. 1994. *Orientalisme* (terjemahan dari *Orientalism, 1979*). Bandung: Pustaka.
- Salmon, Claudine. 1985. *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media. Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunardi, St. 2002. *Semiotika Negativa*. Yogyakarta: Kanak.
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop, Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta: Qalam.
- Suryadinata, Leo. 1992. *Golkar dan Militer*. Jakarta: LP3ES.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1995. *Teori Kesusasteraan* (Terjemahan Melanie Budianta). Jakarta: Grasindo.
- Yudiono, KS. 2003. *Ahmad Tohari: Karya dan Dunianya*. Jakarta: Grasindo.